

Tinjauan Kritis terhadap Penggunaan Aplikasi Sirekap dalam Proses Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024

Rizka Azzahri

Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia. (email: byazzahri17@gmail.com)

Abstrak

Panjangnya proses pengumpulan hasil pemungutan suara pemilihan umum membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menggunakan aplikasi secara online untuk mempercepat pengumpulan perolehan hasil suara pemilihan umum. Selain itu banyaknya kertas C hasil yang dipergunakan untuk menyalin hasil perhitungan suara membuat KPU mempertimbangkan penggunaan aplikasi. Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dibuat oleh KPU untuk menengahi permasalahan tersebut. Ketidaksiapan pemerintah dalam menyediakan *e-governance* khususnya sirekap, aplikasi yang telah berjalan sejak tahun 2020 namun masih banyak kekurangannya, yang seharusnya membuat kinerja pemilu semakin efektif dan efisien malah terkesan membuat kacau. Kesalahan fitur aplikasi yang tidak lengkap, jaringan internet tidak stabil disetiap daerah dan masih banyak permasalahan lain yang membuat aplikasi SIREKAP banyak diprotes oleh KPPS sebagai pengguna aplikasi SIREKAP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan studi dokumen. Studi literatur digunakan untuk mempelajari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi SIREKAP, sementara studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Temuan dalam penelitian ini akan penulis bahas dengan teori efektivitas yang membahas mengenai tingkat keefektifan dan ketepatgunaan penggunaan aplikasi SIREKAP dalam proses pemilu presiden 2024. Timbulnya ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pemilu yang dihitung melalui aplikasi SIREKAP dan kurangnya kesiapan aplikasi serta pendukung penggunaan aplikasi membuat aplikasi SIREKAP menjadi perhatian penulis untuk dibahas dalam penelitian ini.

Kata kunci:

aplikasi SIREKAP; kekurangan; pemilu

Pendahuluan

Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari membuat pemerintah juga mempergunakan perkembangan teknologi dan informasi dalam proses birokrasi. Salah satu pekerjaan pemerintah yang menggunakan bantuan teknologi dan informasi adalah saat dilaksanakannya pemilihan umum. Sejak tahun 2004 pemerintah memutuskan untuk melakukan pemilihan umum secara serentak. Mulai dari pemilihan presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dan DPD RI.

Dipandang dari berbagai sisi, banyak keuntungan yang didapatkan dari dilakukannya pemilu secara serentak ini.

Kecepatan proses, ketepatan dalam menghitung serta kemampuan untuk melakukan kegiatan secara otomatis mampu menarik orang untuk menggunakan teknologi. Pelaksanaan pemilu di Indonesia yang memanfaatkan kemajuan teknologi juga sudah dilakukan dibanyak negara di dunia yang melakukan pemilihan umum. Aplikasi perhitungan hasil suara pemilihan di Indonesia menggunakan Sistem Rekapitulasi atau yang biasa disebut dengan Sirekap. Penggunaan aplikasi Sirekap menuai pro kontra dikalangan elit pejabat maupun dikalangan masyarakat. Beberapa permasalahan yang melibatkan kecanggihan teknologi banyak yang tidak terdeteksi, seperti kebocoran data, peretasan data secara illegal dan pemerataan jaringan internet setiap daerah yang tidak sama.

Kemudahan mengakses dan menyebarkan informasi diinternet juga memiliki kelemahan salah satunya tidak ada filter yang bisa menyaring informasi yang beredar dan tidak ada yang memastikan kebenaran berita yang beredar tersebut. Diera kemajuan saat ini sulit untuk membedakan mana kebenaran yang berdasarkan fakta dan mana kebenaran yang berdasarkan persepsi. Ketidaksiapan Sirekap untuk digunakan dalam proses pemilu presiden 2024 ini dapat mengancam integritas dan keabsahan hasil pemilu.

Kesiapan penggunaan aplikasi Sirekap untuk dipakai pada pemilu presiden 2024 masih dipertanyakan. Karena Sirekap adalah aplikasi rekapitulasi hasil penyempurnaan dari aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara atau biasa disebut dengan Situng. Yang awalnya digunakan untuk mempublikasikan hasil pemilu, tetapi pada pemilu 2024 fungsinya diperluas untuk merekap hasil pemilu manual berjenjang. Meskipun sudah disempurnakan Sirekap masih memiliki banyak kekurangan.

Perbedaan utama antara Situng dan Sirekap terletak pada sumber data dan orang yang menginput data hasil pemilu. Situng bersumber dari kertas C1 hasil pemilu yang merupakan salinan dari kertas C hasil. Kertas C1 yang diisi oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diserahkan ke KPU kecamatan lalu diserahkan ke KPU kabupaten/kota, barulah KPU kabupaten/kota menginput data ke Situng. Untuk Sirekap, datanya bersumber dari kertas C Hasil, difoto langsung oleh petugas KPPS di Tempat Pemilihan Umum. Yang menjadi pembahasan dalam permasalahan ini adalah, banyaknya terjadi kesalahan dalam pembacaan hasil pindaian oleh server KPU. Adanya penggelembungan suara untuk salah satu pasangan calon. Tidak hanya memihak pada satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, tetapi terjadi secara acak. Hal ini menyebabkan kerugian pada pasangan calon presiden lainnya.

Pada pemilu 2019, terjadi *trouble* atau masalah pada server Situng, sehingga terjadi penggelembungan suara yang pada akhirnya menimbulkan keributan pasca pemilu 2019. Tidak jauh berbeda dari tahun 2019, pemilu presiden tahun 2024 juga mengalami masalah serupa. Berdasarkan berita disitus Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2024) salah satu pasangan calon presiden mengajukan gugatan dengan menghadirkan saksi dan bukti bahwa telah terjadi penggelembungan suara pada sistem Sirekap untuk salah satu pasangan calon presiden. Lantaran terdapat ketidaksesuaian antara C Hasil dengan Sirekap.

Kompas.com (2024) juga menjelaskan bahwa terjadi penggelembungan suara hasil pemilu presiden 2024 yang disebabkan oleh kesalahan sistem. Kejadian di daerah Jabodetabek ini dilaporkan terjadi di beberapa TPU. Permasalahan seperti kenaikan suara yang tidak normal, hingga mencapai 800 suara padahal Daftar Pemilih Tetap (DPT) setiap TPS hanya berjumlah maksimal 300 orang. Juga dilaporkan terjadi eror pada saat penggunaan aplikasi Sirekap. Hal ini sulit untuk diatasi karena Sirekap hanya bisa diakses dua atau satu hari sebelum hari H pemilu. Di daerah lain, Bawaslu Kabupaten Blitar mengeluhkan permasalahan ketidakstabilan jaringan internet di daerah mereka terutama daerah pegunungan. Pemerintah setempat melakukan survei, dari 189 desa ada 80 desa yang memiliki kualitas jaringan yang buruk. Kendala inilah yang membuat pengiriman gambar dari TPS ke pusat menjadi terhambat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan studi dokumen. Studi literatur digunakan untuk mempelajari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi SIREKAP, sementara studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi dan program atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses,

maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Efektivitas dapat disimpulkan tercapainya sasaran, tujuan atau hasil kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya.

Makmur dalam bukunya efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa indikator:

1. Ketepatan penentuan waktu
2. Ketepatan perhitungan biaya
3. Ketepatan dalam pengukuran
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan
5. Ketepatan berfikir
6. Ketepatan dalam melakukan perintah
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan
8. Ketepatan sasaran

Salah satu tujuan penggunaan aplikasi Sirekap adalah untuk memangkas waktu pengumpulan hasil pemungutan suara. Dari jenjang terbawah yaitu dari TPS agar bisa sampai di pusat untuk pengelohan perhitungan suara agar lebih cepat. Karena setidaknya butuh waktu hingga 35 hari untuk menyelesaikan proses perhitungan suara dari TPS hingga ke pusat melalui rapat pleno berjenjang. Banyaknya hal yang terkait dalam urusan pemilu, terutama pemilu presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menggunakan Sirekap untuk membantu akuntabilitas dan transparansi serta kecepatan menghitung dan menyelesaikan tugas KPU dalam menuntaskan acara lima tahunan negara ini. Penggunaan teknologi memancing banyak perspektif dari masyarakat yang masih awam dan sensitif terhadap dampak negatif dari teknologi. Maraknya terjadi pembajakan data terhadap sistem informasi pemerintahan membuat masyarakat enggan percaya dengan penggunaan teknologi untuk urusan pemilu.

Ketepatan pengukuran dalam pelaksanaan pemilu presiden 2024 bermasalah pada tingkat kepercayaan publik yaitu terjadinya penggelembungan suara. Penggelembungan suara terjadi karena adanya kesalahan dalam pembacaan hasil *scanning* oleh sistem dalam Sirekap. Cara penggunaan aplikasi Sirekap ini, petugas KPPS memfoto formulir C Hasil langsung melalui aplikasi Sirekap mobile di handphone, lalu seluruh dokumen akan dipindai menjadi dokumen

digital, kemudian dikirim ke *server* KPU pusat yang menggunakan teknologi *Optical Character Recognition* (OCR) dan *Optical Mark Recognition* (OMR). Server akan membaca hasil pindaian lalu melakukan rekapitulasi secara otomatis pada dokumen tersebut. Namun dalam membaca hasil pindaian yang tertulis dikertas, kemampuan Sirekap dalam menangkap dan membaca hasil pindaian masih terbatas. Perbedaan tulisan tangan yang tertera pada kertas C Hasil pun beragam. Akibatnya Sirekap akan menimbulkan kesalahan karena perbedaan interpretasi dan data yang dimiliki oleh server Sirekap itu sendiri. Penggunaan Sirekap dapat meningkatkan resiko kurangnya transparansi karena manipulasi data serta mekanisme pengawasan yang efektif. Manipulasi dan pembajakan data hasil pemilu dapat mempengaruhi integritas dan keabsahan hasil pemilu.

Untuk mengukur ketepatan dalam melakukan perintah, sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi Sirekap ini juga harus mampu menggunakan aplikasi Sirekap dengan baik dan benar. Bagaimana menghadapi aplikasi Sirekap yang mengalami gangguan atau terjadi *trouble* saat penggunaannya dilapangan. Sebelum menggunakan aplikasi Sirekap, terlebih dahulu dilakukan bimbingan teknis kepada anggota KPPS terutama untuk petugas yang akan menggunakan aplikasi Sirekap. Untuk mencegah adanya kesalahan lain, setiap KPPS memiliki 2 orang petugas yang akan menggunakan aplikasi Sirekap. Bimbingan teknis pelaksanaan pemilu juga tetap dilaksanakan untuk memberikan arahan kepada seluruh anggota KPPS tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pemilu. Senior Programme Manager The International Institutue for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) menyarankan agar petugas penyelenggara pemilu disetiap wilayah mendapatkan pelatihan mengenai Sirekap. Serta perlu latihan dan bimbingan terus menerus. Pelatihan perlu diberikan kepada petugas jauh sebelum pemilu dilaksanakan. Fakta dilapangan, pelatihan Sirekap diberikan 5 hari hingga 3 hari sebelum pemilu dilaksanakan. Penyerahan username dan password Sirekap juga di berikan H-3 menjelang pemilu presiden dilaksanakan. Kemudian operator Sirekap yang berjumlah 2 orang disetiap KPPS akan login dengan username dan password masing-masing. Saat pemilu presiden 2024 penggunaan aplikasi Sirekap dipandu melalui grup whatsapp aplikasi. Jika sudah tidak bisa diatasi dengan panduan tersebut, KPPS tingkat kecamatan sebagai pihak yang memegang kendali penuh atas akun Sirekap akan membantu via zoom untuk menyelesaikan permasalahan penggunaan aplikasi Sirekap. Permasalahan tersebut berbagai macam, mulai dari akun yang tidak bisa dibuka, salah password, lupa password, ponsel yang tidak *comatibel*, gangguan jaringan ataupun akun yang tak kunjung muncul setelah *login* berhasil. Pada posisi ini sumber daya manusia yang menggunakan aplikasi Sirekap merasa kesulitan dalam penggunaannya. Terjadi

kebingungan karena tidak ada solusi yang tepat dan pasti untuk setiap permasalahan yang terjadi.

Ketepatan dalam menentukan tujuan dapat dilihat dari hasil akhir apakah Sirekap pada akhirnya mencapai tujuannya. Meskipun penggunaan teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi, keamanan dan transparansi harus menjadi prioritas utama dalam penggunaannya demi memastikan integritas pemilihan yang demokratis.

Mengukur ketepatan sasaran, penggunaan Sirekap dalam pemilu presiden 2024 dapat dilihat dari keadaan geografis. Indonesia yang merupakan negara kepulauan, dengan daerah geografis mulai dari dataran rendah hingga pegunungan, pulau terpencil dan daerah yang masih banyak tertinggal serta tidak aksesibilitas sehingga untuk persebaran penggunaan internet dan jaringan telekomunikasi masih banyak kekurangan. Banyak daerah yang masih belum tersentuh internet, meskipun sudah terdapat jaringan, masih dengan skala rendah. Untuk penggunaan Sirekap secara stabil dibutuhkan jaringan internet dengan kekuatan 4G. Sementara untuk daerah tertinggal, jaringan internet masih sulit untuk diakses.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dari 8 indikator pengukuran efektifitas menurut Makmur, peniliti mengukur dengan 5 indikator yang sesuai dengan pembahasan yang ada. 4 dari 5 indikator tidak tepat penggunaannya, hanya ada 1 indikator yang memenuhi pengukuran yang ada yaitu ketepatan dalam menentukan tujuan. Sirekap digunakan sudah sesuai dengan tujuannya yaitu untuk membantu percepatan pengumpulan hasil rekapitulasi dan fungsi transparansi. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa aplikasi Sirekap belum efektif digunakan dalam kegiatan pemilu. Karena masih perlu perbaikan besar-besaran agar semua kekurangannya dapat segera diatasi.

Jika masih banyak masalah yang belum dapat diatasi, KPU tidak perlu memaksakan penggunaan Sirekap. Dibutuhkan kesadaran KPU bahwa Sirekap belum siap digunakan sebagai alat bantu hitung yang resmi untuk menggantikan proses manual. Dan jika KPU tetap ingin menggunakan teknologi, maka sistem perhitungan dapat dikembangkan menjadi lebih baik dengan *e-voting* karena dengan Sirekap artinya KPU menggunakan dua sistem, manual dan elektronik. Pemilu tetap berjalan dengan proses manual yaitu mencoblos dan masih menggunakan kertas. Tapi *e-voting* menggunakan alat pemilihan yang sekaligus berfungsi untuk menghitung jumlah suara yang didapatkan.

Daftar Pustaka

- Andriansyah, Alpha Pratama. 2024. Perlindungan Hak Informasi Warga Negara Indonesia Dalam Pemilu 2024 Dikaitkan Dengan Problematika Sirekap sebagai Sarana Informasi Alternatif. DOI: <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i2.3166>
- Fazira,Wan. 2022. Dampak Aplikasi Sirekap dalam Pilkada 2020 Kota Tanjung Balai.
- Hardiyanti, Marzellina dkk. 2022. Urgensi Sistem *E-Votting* dan Sirekap dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024. Jurnal Equitable.
<https://blitar.bawaslu.go.id/berita/terkendala-jaringan-sirekap-hanya-untuk-penunjang-data>
<https://desatepus.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/3566-Pengoperasian-Aplikasi-SIREKAP-Pemilu-2024---Kendala-Yang-Mungkin-Muncul>
- <https://jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang/beritadetail-6e4d546c5230316e4a544e454a544e45>
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/02/16/12450011/sederet-dugaan-penggelembungan-suara-pilpres-terjadi-di-sejumlah-tps#>
- <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20195>
- <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20196>
- <https://pemilu.tempo.co/read/1835681/inilah-perbedaan-cara-kerja-sirekap-dengan-situng>
- <https://perludem.org/2024/02/17/masalah-sirekap-perludem-dorong-kpu-libatkan-pihak-eksternal-untuk-audit/>
- <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/47331>
- <https://syadani.onlinelibrary.id/index.php/JS/article/view/213>
- <https://themis.id/laporan-hasil-penelitian-kecurangan-pemilu-dari-penyelenggara-hingga-sirekap/>
- <https://ugm.ac.id/id/berita/menilai-integritas-pemilu-2024-melalui-sirekap/>
- <https://www.kompasiana.com/agustomaros/65dc3132de948f6abc4dd802/sirekap-2024-teknologi-dan-permasalahan-hingga-pro-kontra-dihentikan-atau-dilanjutkan>
- Inzana, Nur. Andy Arya Maulana. Putri Mawang Sari. 2024. Inovasi Sirekap dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. <https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/index>
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
- Kusumadinata, Ali Alamsyah. 2024. Sosialisasi Sirekap sebagai Alat Bantu Pemilu Nasional Tahun 2024. <https://doi.org/10.59025/js.v3i2.213>

Nurmakidem, Mario. 2024. Sirekap: Tantangan Dan Potensi Kekeliruan Proses Rekapitulasi Pemilu Serentak di Indonesia. Website:
<http://ejurnal.fis.ung.ac.id/index.php/sjppm/about>

Rahman, Ilham Nur Pratama. 2023. Digitalisasi Penghitungan Suara melalui Sirekap pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Indonesia.